


Analisis Sistem Akuntansi Instansi dalam Upaya Pencegahan Kerugian Daerah Berdasarkan Temuan BPK pada LKPD Provinsi Sumatera Utara

Gilbert Septian Taruli Silitonga^{1*}, Yogi Radika Yuda Lubis², Yoga Alfrido Purba³, Angga Ryan Syahputra⁴, Putri Kemala Dewi Lubis⁵, Nela Permata Sari Lubis⁶

¹⁻⁶Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

E-mail: gilbertseptian22@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6069>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 01 Mar 2026

Revised: 15 Mar 2026

Accepted: 09 April 2026

Kata Kunci:

Sistem akuntansi instansi, kerugian daerah, LKPD, BPK, pengelolaan keuangan daerah

Keywords:

Institutional accounting system, regional financial loss, LKPD, BPK, regional financial management

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem akuntansi instansi dalam upaya pencegahan kerugian daerah berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang memanfaatkan data sekunder berupa literatur, dokumen resmi, serta laporan hasil pemeriksaan BPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi instansi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan dalam penerapan sistem tersebut, seperti ketidaktepatan pencatatan transaksi, lemahnya pengendalian internal, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Temuan BPK menjadi indikator penting adanya celah dalam sistem akuntansi yang berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem akuntansi instansi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem pengendalian internal, serta pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, sistem akuntansi instansi diharapkan mampu berfungsi secara optimal dalam mencegah kerugian daerah serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah.

This study aims to analyze the role of institutional accounting systems in preventing regional financial losses based on the findings of the Supreme Audit Agency (BPK) on the Regional Government Financial Statements (LKPD) of North Sumatra Province. The research employs a descriptive method with a qualitative approach, utilizing secondary data derived from literature, official documents, and audit reports issued by BPK. The results indicate that the institutional accounting system plays a crucial role in enhancing transparency, accountability, and effectiveness in regional financial management. However, several weaknesses are still identified, including inaccuracies in transaction recording, weak internal control systems, and non-compliance with applicable regulations. BPK findings serve as a significant indicator of gaps within the accounting system that may potentially lead to regional financial losses. Therefore, strengthening the institutional accounting system is necessary through improving human resource competencies, optimizing internal control systems, and utilizing information technology. Consequently, the accounting system is expected to function optimally in preventing regional losses and improving the quality of public financial governance.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.



How to Cite: Gilbert Septian Taruli Silitonga, et al (2026). Analisis Sistem Akuntansi Instansi dalam Upaya Pencegahan Kerugian Daerah Berdasarkan Temuan BPK pada LKPD Provinsi Sumatera Utara, 4(4) 23745-23750. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6069>

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, sistem akuntansi instansi memiliki peranan strategis sebagai instrumen utama dalam proses pencatatan, pengolahan, hingga pelaporan transaksi keuangan. Penerapan sistem akuntansi yang baik akan menghasilkan informasi keuangan yang andal dan relevan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta sebagai alat pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, dalam praktiknya pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Permasalahan tersebut umumnya berkaitan dengan lemahnya sistem pengendalian internal, ketidaksesuaian dalam pencatatan transaksi, serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi instansi belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Ketidakefektifan sistem tersebut dapat berdampak pada menurunnya kualitas laporan keuangan serta meningkatnya risiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melalui laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), BPK memberikan penilaian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan serta mengungkap berbagai temuan yang berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Temuan-temuan tersebut tidak hanya mencerminkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam penerapan sistem akuntansi instansi yang berpotensi menimbulkan kerugian daerah apabila tidak segera ditindaklanjuti.

Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu daerah dengan aktivitas keuangan yang kompleks tidak terlepas dari berbagai temuan pemeriksaan BPK terkait pengelolaan keuangan daerah. Beberapa permasalahan yang sering ditemukan meliputi ketidaktertiban dalam pencatatan aset, perbedaan data laporan keuangan dengan kondisi riil, serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sistem akuntansi instansi yang diterapkan masih memerlukan perbaikan dan penguatan, khususnya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis peran sistem akuntansi instansi dalam upaya pencegahan kerugian daerah berdasarkan temuan BPK pada LKPD Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik serta secara praktis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi kerugian daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang terjadi tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap peran sistem akuntansi instansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta kaitannya dengan upaya pencegahan kerugian daerah berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji fenomena secara komprehensif dan kontekstual, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi aktual yang terjadi dalam praktik pengelolaan keuangan daerah (Moleong, 2017).

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah, khususnya pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara. Objek penelitian adalah sistem akuntansi instansi yang digunakan dalam proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan

daerah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji temuan-temuan yang diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi Sumatera Utara. Temuan tersebut dijadikan sebagai indikator untuk menilai efektivitas sistem akuntansi instansi dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta dalam upaya mencegah terjadinya kerugian daerah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya. Data utama berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Sumatera Utara, yang memuat informasi mengenai temuan audit serta rekomendasi perbaikan. Selain itu, data pendukung diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi, di mana peneliti mengkaji berbagai literatur serta dokumen resmi yang berkaitan dengan sistem akuntansi instansi dan pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam sehingga dapat mendukung proses analisis secara ilmiah (Sugiyono, 2019).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang sistematis agar mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil interpretasi terhadap data yang telah dianalisis. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengidentifikasi hubungan antara penerapan sistem akuntansi instansi dengan temuan pemeriksaan BPK serta implikasinya terhadap potensi kerugian daerah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat penerapan sistem akuntansi instansi (Miles & Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Tahap perencanaan diwujudkan melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi dasar dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintahan. Pada tahap pelaksanaan, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, proses penatausahaan dilakukan melalui pencatatan setiap transaksi keuangan secara sistematis, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Proses ini menunjukkan bahwa secara prosedural pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik (Sari & Putra, 2020).

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan pada setiap akhir periode anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik. LKPD tersebut mencerminkan kondisi keuangan daerah yang meliputi posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan selama satu periode. Dalam hal ini, pemerintah daerah telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, yang secara konseptual mampu memberikan informasi keuangan yang lebih komprehensif dan relevan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Pratama & Wulandari, 2019).

Meskipun demikian, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap LKPD Provinsi Sumatera Utara masih menunjukkan adanya berbagai permasalahan yang signifikan. Temuan tersebut antara lain mencakup ketidaktepatan dalam pencatatan transaksi keuangan, kelemahan dalam sistem pengendalian internal, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat pula permasalahan dalam pengelolaan aset daerah, seperti pencatatan aset yang belum tertib dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan akuntansi pemerintah daerah menjadi penyebab utama munculnya temuan audit (Rahmawati & Suryono, 2021).

Temuan lainnya yang tidak kalah penting adalah masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa proses perbaikan terhadap kelemahan sistem yang telah diidentifikasi belum berjalan secara maksimal. Selain itu, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem akuntansi instansi turut menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Yuliani et al., 2020).

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, sistem akuntansi instansi memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Secara konseptual, sistem akuntansi instansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan yang mampu memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Sari & Putra, 2020). Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi instansi di Provinsi Sumatera Utara masih belum sepenuhnya memenuhi karakteristik tersebut.

Kelemahan dalam sistem akuntansi instansi yang ditemukan dalam penelitian ini mencerminkan adanya permasalahan struktural dan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara struktural, kelemahan tersebut berkaitan dengan belum optimalnya integrasi antara sistem akuntansi dengan sistem pengendalian internal. Sementara itu, secara teknis, permasalahan tersebut terlihat dari ketidaktepatan dalam pencatatan transaksi serta kurangnya ketelitian dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa lemahnya implementasi sistem akuntansi dapat menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Pratama & Wulandari, 2019).

Selain itu, kelemahan sistem pengendalian internal yang teridentifikasi dalam temuan BPK memperkuat argumentasi bahwa efektivitas sistem akuntansi sangat dipengaruhi oleh kualitas pengendalian internal yang diterapkan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan serta dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan (Rahmawati & Suryono, 2021). Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian internal menjadi prasyarat utama dalam meningkatkan efektivitas sistem akuntansi instansi.

Dalam konteks pencegahan kerugian daerah, sistem akuntansi instansi memiliki fungsi yang sangat penting sebagai alat deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. Sistem yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik akan memungkinkan setiap transaksi keuangan dapat ditelusuri secara jelas, sehingga memudahkan proses audit dan pengawasan. Hal ini didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa kualitas sistem akuntansi yang baik mampu menekan potensi fraud dan kerugian daerah (Yuliani et al., 2020). Oleh karena itu, optimalisasi sistem akuntansi instansi menjadi langkah strategis dalam mencegah terjadinya kerugian daerah.

Lebih lanjut, rendahnya tingkat tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK menunjukkan adanya permasalahan dalam komitmen organisasi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan sistem. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat tindak lanjut rekomendasi audit memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah (Sari & Putra, 2020). Dengan demikian, komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK menjadi faktor penting dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah.

Selain aspek sistem dan pengendalian, faktor sumber daya manusia juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi sistem akuntansi instansi. Kompetensi aparatur dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan menjadi kunci utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Yuliani et al., 2020). Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi juga perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data keuangan.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa perbaikan sistem akuntansi instansi harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan yang terintegrasi, yang mencakup penguatan sistem

pengendalian internal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan berbagai hasil penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya sinergi antara sistem, sumber daya manusia, dan teknologi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mencegah terjadinya kerugian daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penerapan sistem akuntansi instansi sebagai bagian dari proses tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual juga mencerminkan komitmen dalam meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan agar lebih komprehensif dan informatif.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi instansi masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasikan adanya kelemahan dalam pencatatan transaksi keuangan, sistem pengendalian internal, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, permasalahan dalam pengelolaan aset daerah dan belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem yang dirancang secara normatif dengan implementasi yang terjadi di lapangan.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas sistem akuntansi instansi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kualitas sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi. Kelemahan pada aspek-aspek tersebut akan berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan serta meningkatnya risiko terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memperkuat ketiga aspek tersebut guna meningkatkan efektivitas sistem akuntansi instansi.

Dengan demikian, sistem akuntansi instansi memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan kerugian daerah melalui penyediaan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan dapat ditelusuri. Sistem yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. Oleh karena itu, penguatan sistem akuntansi instansi yang didukung oleh pengendalian internal yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi yang optimal menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada prinsip *good governance*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Jakarta: BPK RI.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). Internal control—Integrated framework. New York, NY: COSO.
- Halim, A. (2014). Akuntansi keuangan daerah (Edisi revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2019). Akuntansi sektor publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Amin, M., & Nasution, D. (2022). Analisis penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Audit Indonesia*, 26(1), 67–78.
- Putri, R. A., & Handayani, N. (2021). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(5), 1–17.
- Kurniawan, A., & Sari, M. (2023). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 11(2), 101–115.
- Saputra, H., & Lestari, W. (2022). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 215–230.
- Wahyuni, S., & Prasetyo, E. (2021). Analisis temuan audit BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 89–102.
- Setiawan, B., & Arifin, Z. (2023). Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam meningkatkan transparansi keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 8(1), 55–70.
- Pratama, R., & Wulandari, S. (2019). Pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(2), 45–58.
- Rahmawati, E., & Suryono, B. (2021). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–15.
- Sari, D. P., & Putra, A. (2020). Pengaruh sistem akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(1), 23–34.
- Yuliani, N., Fitriani, N., & Saputra, D. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 391–406.